

Tim Kajian Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja

Muhammad Hanri, Ph.D.

hanri@lpem-feui.org

Nia Kurnia Sholihah, S.E.

Nia.kurnia@lpem-feui.org

DAFTAR ISI

Ketenagakerjaan dalam
Target Indonesia Emas
2045 – 1

Target dan Strategi
Pencapaian – 3



*Labor Market Brief dapat diakses
setiap bulan secara gratis dengan
memindai kode QR di atas atau
melalui tautan:
<https://bit.ly/labormarketbrief>*

Aspek Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan dalam Indonesia Emas 2045

Ringkasan

Indikator ketenagakerjaan menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045. Sampai dengan tahun 2025, pemerintah fokus pada reformasi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Dalam jangka menengah, pemerintah berupaya menguatkan transisi lapangan kerja dan pelatihan berbasis kompetensi serta relevansi terutama di bidang keteknikan dan teknologi informasi. Pemerintah kemudian akan mendorong sertifikasi dan perluasan SJSN ketenagakerjaan di jangka panjang. Upaya dalam pemenuhan target indikator ketenagakerjaan tersebut memiliki beberapa tantangan dan peluang dalam pemenuhannya. Hal-hal tersebut dibahas pada What You Need to Know Series pada Labor Market Brief edisi ini.

Ketenagakerjaan dalam Target Indonesia Emas 2045

Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut menargetkan di tahun 2045, Indonesia diharapkan akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju sebagai negara yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional, dengan kemiskinan mendekati 0 persen dan ketimpangan berkurang. Untuk mewujudkan target tersebut, RPJPN 2025-2045 telah merumuskan 8 Agenda Pembangunan, 17 Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 Indikator Utama Pembangunan.

Pencapaian Visi Indonesia dibangun dengan 4 pilar pembangunan, yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Masing-masing pilar berisi bidang-bidang pembangunan,

dari pendidikan hingga politik luar negeri, yang harus dibangun dan dipercepat hingga tahun 2045 untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045.



Gambar 1. Empat Pilar Indonesia Emas 2045

Sumber: Bappenas (2023)

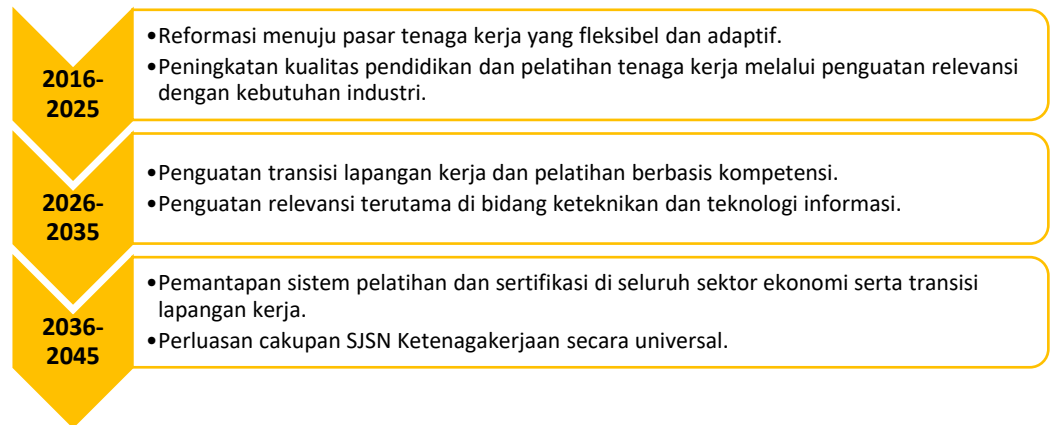
Dari sudut pandang ketenagakerjaan, produktivitas tenaga kerja perlu ditingkatkan dan kemajuan teknologi perlu lebih dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Perubahan struktur ekonomi dan kemajuan teknologi perlu diikuti dengan perubahan struktur tenaga kerja yang semakin baik. Pasar tenaga kerja perlu dipromosikan agar lebih fleksibel dan adaptif. Beberapa indikator ketenagakerjaan yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2045 di antaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Target Pembangunan Berdasarkan Indikator Ketenagakerjaan

Indikator	2015	2045
Tingkat partisipasi angkatan kerja	65,8%	78%
Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	48,9%	65%
Angkatan kerja (juta orang)	122,4%	197,2%
Tingkat pengangguran terbuka	6,2%	3-4%
Porsi tenaga kerja di sektor pertanian	32,9%	13%
Angkatan kerja dengan pendidikan SMA ke atas	39,3%	90%

Sumber: Bappenas (2023)

Adapun tahapan strategi ketenagakerjaan yang akan ditempuh pemerintah adalah sebagai berikut:

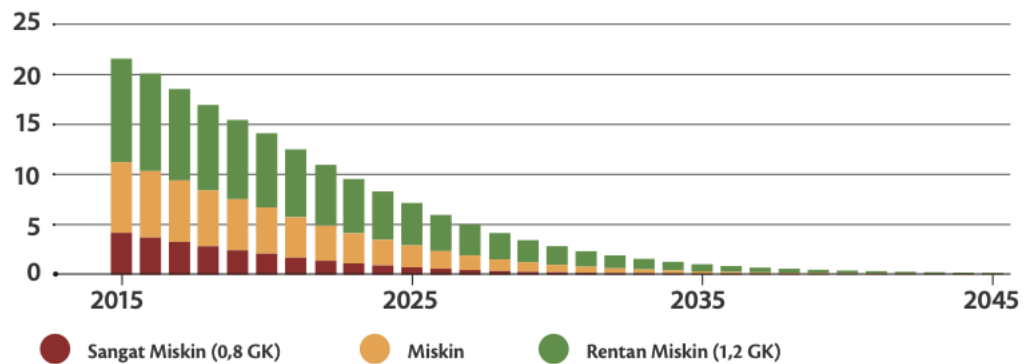


Gambar 2. Strategi Ketenagakerjaan Sampai dengan 2045

Sementara itu, aspek perlindungan sosial dipayungi oleh pilar ketiga: Pemerataan Pembangunan. Pemerataan pembangunan ditargetkan menjadi semakin luas dengan pendapatan yang semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat, kesenjangan antarwilayah yang semakin kecil, infrastruktur yang terintegrasi dan merata, serta kemiskinan akut berhasil diatasi. Hal ini juga sangat berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dengan pilar *zero poverty*.

Target dan Strategi Pencapaian

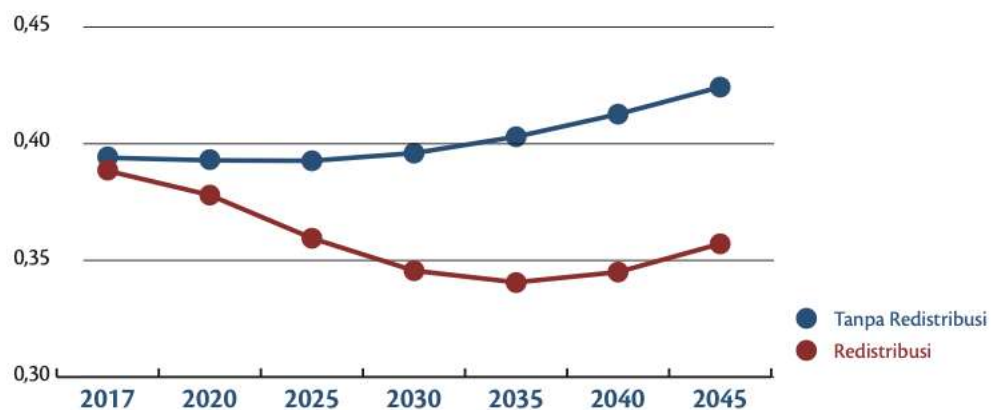
Pada tahun 2045, Indonesia memiliki target ambisius untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan dan mencapai tingkat kemiskinan yang rendah. Namun, perlu dicatat bahwa target kemiskinan yang spesifik untuk tahun 2045 mungkin tidak secara eksplisit didefinisikan pada saat ini, mengingat jangka waktu yang panjang dan kemungkinan perubahan dalam konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan di masa depan.



Gambar 3. Proyeksi Tingkat Kemiskinan

Sumber: Bappenas (2023)

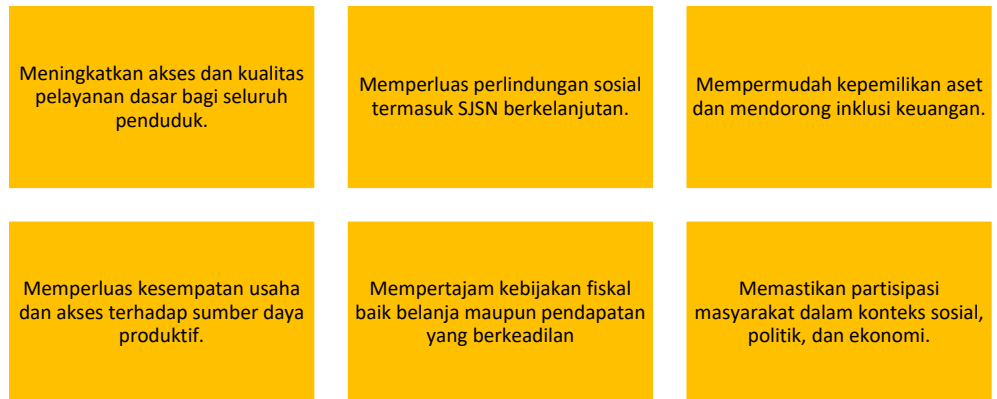
Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan terus diupayakan berkurang. Kebijakan redistribusi dan inklusif ditingkatkan agar menjangkau semua kelompok masyarakat. Program Afirmasi terus didorong terutama ke daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di KTI. Rasio Gini diperkirakan turun ke tingkat ideal sebesar 0,34 pada tahun 2035 dan selanjutnya berada pada rentang yang berkelanjutan. Indonesia terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040.



Gambar 4. Proyeksi Rasio Gini

Sumber: Bappenas (2023)

Untuk mencapai target tersebut dengan tepat waktu, pemerintah menyusun strategi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam RPJPN yang mencakup 6 langkah pokok, sebagaimana gambar berikut.



Gambar 5. Strategi Pemerataan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan dalam RPJPN 2025-2045

Terdapat beberapa tantangan pemenuhan target pengentasan kemiskinan, terutama pandemi COVID-19 yang mengganggu penurunan angka kemiskinan. Menurut proyeksi *business as usual* (BAU), angka kemiskinan pada tahun 2030 masih sebesar 6,61%. Dalam skenario intervensi, bisa naik menjadi 3,83% pada saat bersamaan. Tren ini sejalan dengan target (rancangan) RPJPN sebesar 0,5-0,8% pada tahun 2045.

Lebih lanjut, terlihat pula gambaran ketimpangan melalui Rasio Gini yang bergerak relatif stagnan pada periode tahun 2021-2022, meskipun telah mengalami perbaikan dari angka Rasio Gini pada tahun 2020 di saat pandemi COVID-19. Proyeksi BAU memperlihatkan bahwa Rasio Gini mencapai 0,372 pada 2030. Sementara proyeksi skenario intervensi memperlihatkan capaian yang lebih rendah sebesar 0,363 pada 2030. Untuk proyeksi jangka panjang, Rasio Gini ditargetkan turun menjadi 0,290-0,320 pada draf RPJP. Tantangan pengurangan ketimpangan memerlukan intervensi kebijakan yaitu reformasi sistem perlindungan sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional, penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja masa depan, pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah, serta penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata.

Akses terhadap sanitasi layak juga dapat berkaitan erat dengan kesehatan dan lingkaran kemiskinan. Kurangnya akses terhadap sanitasi layak akan menurunkan kualitas air dan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap peningkatan prevalensi *stunting* pada anak-anak. Proyeksi BAU

menunjukkan bahwa akses sanitasi layak pada tahun 2030 akan mencapai 86,56%. Sedangkan, dengan skenario intervensi pada tahun 2024 akses sanitasi layak mencapai 90% dan 100% di tahun 2030. Kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana antar pulau Jawa dan luar Jawa menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam pemenuhan akses terhadap pelayanan dasar yaitu layanan air minum, sanitasi layak, fasilitas penyehatan dasar, serta sarana dan prasarana dasar belum tahan bencana.

Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan menyatakan akan menyasar individu-individu yang berada pada desil 1 yang berkisar sebanyak 27,4 juta jiwa. Untuk mewujudkan hal ini, Kementerian Keuangan merumuskan tiga langkah strategis. Pertama yaitu pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan. Hal ini akan dilakukan dengan memperbaiki ketepatan sasaran desil 1, meningkatkan indeks PKH dan sembako, serta optimalisasi BLT desa. Kemudian, pemerintah juga akan mencoba meningkatkan pendapatan RT miskin dan rentan dengan cara penambahan proyek padat karya K/L, serta optimalisasi program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Tidak lupa akses infrastruktur dasar di desa yang mencakup sanitasi, air minum dan puskesmas juga akan ditingkatkan.

8 DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH



10 REDUCED
INEQUALITIES



Referensi

- https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf
- <https://sdgs.bappenas.go.id/sdgs-adalah-pokok-penting-acuan-mencapai-indonesia-emas-2045/>
- <https://www.bappenas.go.id/id/berita/luncurkan-rancangan-akhir-rpjp-2025-2045-presiden-paparkan-visi-indonesia-emas-2045-c29Ju>

ISSN 2808-2060

